



e-ISSN 2798-8260

Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 5, No 1, 2025, Page: 1-12

Konflik Internal Partai Politik: Analisis Lahirnya Partai Gelora Sebagai Dampak Pecahnya Partai Keadilan Sejahtera

Abdul Ghofur*, Khalifah Nur Khaliq Pohan, Rahma Nanda Azizah, Kayla Putri Alena, Zalfa Octaviani, Dwi Septian Hadinugroho

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta proses pembentukan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) yang muncul sebagai dampak dari perpecahan tersebut. Konflik internal PKS tidak hanya terjadi di tingkat kepemimpinan, tetapi juga melibatkan perbedaan visi, orientasi ideologis, dan kepentingan dari berbagai faksi di dalam partai. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan studi kasus, dengan mengandalkan dokumentasi, media, dan laporan jurnal ilmiah, untuk memahami akar permasalahan, proses, dan dampak dari perpecahan PKS terhadap konfigurasi perpolitikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan visi antara kelompok elite senior dan kader muda, distribusi kekuasaan yang tidak merata, serta rigiditas ideologis menjadi akar konflik yang tidak dapat diselesaikan secara internal. Hal ini kemudian mendorong kelompok yang merasa tidak terakomodasi untuk mendirikan Partai Gelora pada tahun 2019, yang lebih terbuka, moderat, dan pragmatis, demi mencapai visi Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di kancah internasional. Penelusuran yang lebih mendalam juga menemukan bahwa perpecahan PKS mencerminkan proses transformasi internal sebuah partai, yaitu pergeseran dari ideologis yang eksklusif menuju pendekatan yang lebih inklusif dan akomodatif. Penelitian ini bermanfaat untuk memahami bagaimana perbedaan visi, kepentingan, dan pendekatan kepemimpinan dapat menjadi akar perpecahan internal serta pembentuk kekuatan politik baru, dan juga sebagai pembelajaran mengenai pentingnya manajemen konflik dan demokratisasi internal untuk menjaga keutuhan partai.

Kata Kunci: PKS, Gelombang Rakyat Indonesia, Perpecahan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2643>

*Correspondence: Abdul Ghofur

Email:

2310413014@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 12-04-2025

Accepted: 14-05-2025

Published: 21-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the internal conflict of the Prosperous Justice Party (PKS) and the formation process of the Indonesian People's Wave Party (Gelora) which emerged as a result of the split. The internal conflict of PKS did not only occur at the leadership level, but also involved differences in vision, ideological orientation, and interests of various factions within the party. This study adopted a qualitative approach and case study, relying on documentation, media, and scientific journal reports, to understand the root of the problem, process, and impact of the PKS split on the configuration of politics in Indonesia. The results of the study show that differences in vision between the senior elite group and young cadres, the uneven distribution of power, and ideological rigidity are the roots of the conflict that cannot be resolved internally. This then encouraged groups who felt unaccommodated to establish the Gelora Party in 2019, which is more open, moderate, and pragmatic, in order to achieve the vision of a superior Indonesia that is able to compete internationally. A deeper search also found that the PKS split reflects the process of internal transformation of a new political forces, and also as a lesson on the importance of conflict management and internal democratization to maintain the integrity of the party.

Keywords: PKS, Indonesian People's Movement, Division

Pendahuluan

Partai politik merupakan salah satu elemen krusial dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Fungsinya sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan, sekaligus wahana rekrutmen kepemimpinan politik, menjadikan partai politik tidak sekadar aktor pemilu, tetapi juga institusi sosial yang berperan dalam membentuk arah kebijakan negara. Namun demikian, dinamika internal dalam partai seringkali menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal konsolidasi, terutama ketika dihadapkan pada konflik kepentingan antar elite partai. Salah satu kasus menarik dalam konteks ini adalah konflik internal yang terjadi di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS, sebagai partai berbasis ideologi Islam, pernah dikenal sebagai partai dengan struktur kaderisasi yang kuat dan soliditas internal yang tinggi. Namun, sejak sekitar tahun 2015 hingga 2019, berbagai dinamika konflik mulai mencuat ke permukaan, termasuk pemecatan tokoh-tokoh kunci seperti Fahri Hamzah dan munculnya perbedaan tajam dalam strategi serta visi politik partai. Konflik tersebut tidak hanya menimbulkan keretakan internal, tetapi juga menjadi jalan lahirnya partai baru yang kemudian dikenal sebagai Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) pada tahun 2019 (Kodiman, A., & Fatimah, S., 2023).

Topik ini menjadi menarik untuk diteliti karena menunjukkan bagaimana konflik internal dalam partai tidak hanya berujung pada disintegrasi, tetapi juga melahirkan alternatif kekuatan politik baru. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam sistem kepartaian Indonesia yang cenderung fleksibel dan terbuka terhadap pendirian partai baru, setiap konflik internal berpotensi mengubah konstelasi politik secara signifikan. Terlebih, lahirnya Partai Gelora yang digawangi oleh tokoh-tokoh eks PKS seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah menimbulkan wacana baru tentang reorientasi politik Islam yang lebih moderat dan nasionalis dibandingkan dengan karakter ideologis PKS sebelumnya (Aspinall, E., & Mietzner, M., 2019).

Dinamika konflik internal PKS dan kemunculan Partai Gelora merupakan topik yang sudah dipilih beberapa peneliti sebelumnya, namun terdapat beberapa keterbatasan yang ditemukan sehingga diperlukan pengembangan dalam penelitian. Sebagian besar riset yang ada cenderung fokus pada faktor struktural dan institusional dengan contoh kegagalan manajemen konflik internal, rigiditas kaderisasi, serta lemahnya mekanisme deliberasi partai. Riset ini merujuk pada struktural dan institusional (Harefa Nia, R. T. *et al.*, 2019).

Pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek-aspek kultural dan psikologis dari para aktor politik yang terlibat, termasuk motivasi personal, persepsi terhadap legitimasi kepemimpinan, dan strategi komunikasi yang digunakan dalam membangun wacana tandingan di dalam dan luar partai. Banyaknya identifikasi mengenai PKS sering muncul akibat kepemimpinan yang terlalu sentralisasi dan mengalami kegagalan pada regenerasi kader sehingga mendorong adanya perpecahan yang berujung lahirnya partai baru yaitu Gelora. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara mendalam menelusuri bagaimana transformasi identitas politik berlangsung dari level elite ke basis akar rumput setelah perpecahan partai terjadi. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang bagaimana legitimasi politik dibangun kembali oleh aktor-aktor eks partai induk dalam konteks pembentukan partai baru (Sidiq, Muhammad. *et al.*, 2023).

Sebagai pembaruan penelitian yang mempertimbangkan keterbatasan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang memadukan analisis institusional, pendekatan kultural, dan teori komunikasi politik dalam menelusuri dinamika konflik dan transisi politik dari PKS ke Partai Gelora. Metode kualitatif yang bersifat eksploratif dan melibatkan wawancara mendalam terhadap aktor-aktor kunci serta analisis wacana terhadap narasi yang dibangun di media digunakan untuk mengetahui dan memahami dinamika yang tidak tergambar dalam analisis struktural. Selain itu, dengan membandingkan kasus PKS-Gelora dengan fenomena serupa di partai politik lain, seperti PAN dan lahirnya Partai Ummat, studi ini juga dapat memperluas cakupan teoritis dalam memahami pola faksionalisme dan pembentukan partai baru di Indonesia. Dengan demikian, kontribusi utama dari penelitian ini adalah memperkaya kajian ilmu politik Indonesia dengan perspektif baru mengenai hubungan antara konflik internal, transformasi identitas politik, dan pembentukan kekuatan politik alternatif, dalam konteks sistem multipartai yang cair dan terbuka seperti di Indonesia (Nugraha, T. A., & Mukti, H. G., 2023).

Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada dinamika konflik internal yang terjadi di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan bagaimana konflik tersebut berujung pada pembentukan partai baru, yakni Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora). Konflik yang terjadi tidak hanya bersifat personal antartokoh, tetapi juga mencerminkan perbedaan pandangan ideologis, strategi politik, dan arah perjuangan partai. Perselisihan ini semakin menguat seiring munculnya ketegangan antara faksi-faksi internal, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah (Akmar, Z., 2019).

Ketidaksepakatan yang tak kunjung terselesaikan tersebut pada akhirnya mendorong sebagian kader dan elite partai untuk mendirikan wadah politik baru yang dianggap lebih sesuai dengan aspirasi dan visi mereka. Dalam konteks ini, penting untuk dianalisis bagaimana proses dan dinamika konflik internal tersebut berkembang, serta bagaimana hal itu menjadi katalis lahirnya Partai Gelora sebagai entitas politik yang membawa warna baru dalam peta perpolitikan Indonesia. Bagaimana konflik internal partai PKS melahirkan partai gelora?

Metode Penelitian

Penelitian ini menyelidiki dinamika konflik internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengarah pada pembentukan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dengan menggunakan metodologi studi kasus. Penelitian ini bersifat naturalistik dan berkonsentrasi pada konteks sosial-politik Indonesia sejak tahun 2015, ketika perselisihan antara elit PKS mulai muncul, hingga periode pasca-pendirian Partai Gelora pada 2019. Konflik dalam bingkai struktural bukan satu-satunya fokus penelitian ini, itu juga menyelidiki elemen kultural dan komunikasi politik yang melatari transformasi politik para elite. Penelitian ini menganalisis data secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif, di mana peneliti mengidentifikasi pola-pola makna dari hasil wawancara mendalam, dokumen media, serta pernyataan resmi dari para aktor politik yang terlibat. Data yang

telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik pengkodean tematik untuk mengidentifikasi kategori-kategori utama yang berkaitan dengan dinamika konflik, latar belakang ideologis, serta taktik komunikasi politik yang diterapkan oleh elite PKS dan Partai Gelora. Peneliti juga menerapkan triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan data, dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen dan sumber informasi. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji cara narasi konflik dibentuk, bagaimana perpecahan muncul, dan bagaimana aktor politik menggambarkan identitas serta posisi politik mereka di tengah perubahan struktur kekuasaan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Braun dan Clarke yang menekankan signifikansi analisis tematik dalam penelitian kualitatif untuk memahami makna sosial secara mendalam dari data yang kompleks (Braun dan Clarke, 2019). Di samping itu, penerapan triangulasi juga merujuk pada pendekatan yang menyatakan bahwa keabsahan dalam penelitian kualitatif dapat diperkuat dengan menggabungkan berbagai sumber dan sudut pandang (Flick, 2018). Fokus pada interpretasi naratif para aktor politik juga berkaitan dengan kerangka pemikiran Wodak dalam analisis wacana kritis, yang menganggap narasi politik sebagai alat penting dalam penciptaan identitas kelompok dan legitimasi kekuasaan dalam konteks konflik (Wodak, 2020).

Untuk mengumpulkan data, dokumentasi dan media dipelajari, seperti jurnal, atau artikel berita. Dokumentasi dan media digunakan untuk menganalisis narasi publik dan proses pembentukan identitas politik baru. Analisis data menggunakan metode analisis tematik, yang memungkinkan peneliti menemukan pola, tema, dan hubungan antar fenomena. Analisis terdiri dari pengurangan data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan induktif. Triangle sources, member checking, dan peer debriefing adalah teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa data itu valid dan sah. Studi ini menggunakan teori konflik sosial Marx dan Coser, yang memandang konflik sebagai hasil dari ketidakseimbangan kekuasaan dalam struktur sosial. Menurut Coser (1956), konflik dapat memiliki manfaat jika dikelola dengan baik, tetapi jika ditekan, dapat menjadi buruk.

Dalam konteks ini, perselisihan antar PKS menunjukkan ketidakmampuan organisasi untuk menerima perubahan internal. Selain itu, faksi pembaru yang berkembang menjadi kekuatan politik baru digambarkan melalui teori fraksionalisasi Boucek (2009).

Hasil dan Pembahasan

Masalah Utama yang Menyebabkan Konflik Partai Keadilan Sejahtera

Konflik internal di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berujung pada berdirinya Partai Gelora dapat dipandang sebagai bentuk kompleks dari persaingan kekuasaan, perbedaan ideologi, serta kegagalan dalam institusionalisasi manajemen konflik di dalam struktur partai. Perkara utama yang memicu perselisihan ini berasal dari tiga aspek. Pertama, ketidakmerataan distribusi kekuasaan tampak dari dominasi fraksi tertentu dalam struktur partai yang menyebabkan pengucilan kelompok reformis seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah. Dalam konteks ini, perselisihan timbul karena tidak berhasilnya mekanisme deliberatif dalam mengakomodasi aspirasi politik yang beragam dari kelompok subordinat. Konflik di dalam organisasi terjadi saat kelompok yang lebih rendah tidak

mempunyai akses ke saluran resmi untuk menyampaikan permintaan mereka. Sewaktu saluran ini terhambat, maka tekanan akan meledak dalam bentuk reaksi oposisi atau bahkan perpecahan institusional (Hazan & Rahat, 2019).

Kedua, ada perbedaan mencolok dalam orientasi ideologis serta strategi politik antara elit lama dan elit muda. Kelompok elit cenderung mempertahankan identitas ideologis Islam yang konservatif, sementara kelompok baru mengangkat narasi politik Islam yang lebih inklusif dan berorientasi nasionalis. Menurut teori konflik, keadaan konflik merupakan sebuah situasi yang tidak dapat dihindari termasuk dalam elemen budaya yang dilihat Parsons sebagai unsur pengikat sekalipun. Coser sebagai penganut teori konflik melihat hal tersebut berawal dari adanya keagresifan atau sikap bermusuhan dalam diri orang sebagai individu, sehingga masyarakat akan selalu mengalami konflik. Konflik dalam hal ini dilihat Coser dalam dua bentuk yakni konflik realistik dan konflik nonrealistik (Pangarra, 2014).

Ketiga, sistem kaderisasi yang ketat dan hirarkis memperburuk keadaan. Struktur kaderisasi PKS yang tertutup menyebabkan penolakan dari para kader yang menginginkan perubahan dalam cara politik partai (Rizky, 2021). Kegagalan PKS dalam melakukan reformasi sistem internal ini pada akhirnya menyebabkan keluarnya elite dan kader yang merasa aspirasi mereka tidak diperhatikan, suatu keadaan yang memperkuat timbulnya faksi-faksi yang bersifat merusak (Satria, 2022).

Secara Struktural PKS merupakan partai kader yang terlembaga dengan praktik internalnya yang masih menunjukkan dominasi elit tertentu terutama pada Dewan Syuro. Kondisi ini yang menjadi salah satu sumber masalah mengindikasikan kurangnya demokratisasi internal yang berpotensi adanya ketidakpuasan kader. Dominasi elit berkontribusi adanya ketegangan internal pada pengelolaan perbedaan pendapat, sebagaimana terlihat Fahri Hamzah dengan pemimpin PKS yang berujung pada pemecatan dan gugatan hukum (Akmar, Z., 2019).

Menurut sumber Ali Rif'an Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, mengatakan bahwa konflik internal dari PKS ini bersumber dari tiga aspek, yaitu: adanya ketimpangan distribusi kekuasaan, ketegangan antar generasi, dan perbedaan orientasi ideologi dalam tubuh partai. Generasi muda PKS digambarkan sebagai kelompok yang memiliki visi lebih inklusif dan moderat. Mereka menginginkan agar PKS tidak terus-menerus berada dalam posisi politik yang kaku di sayap kanan, melainkan bergeser ke tengah agar bisa menjangkau pemilih yang lebih luas, terutama kelompok Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dalam pandangan mereka, pendekatan pragmatis dan programatik lebih relevan untuk menyentuh kebutuhan masyarakat ketimbang terpaku pada ideologi semata. Sebaliknya, kelompok tua atau senior dalam PKS masih berpegang teguh pada ideologi partai yang konservatif. Mereka cenderung menjaga karakter ideologis PKS sebagai partai Islam yang eksklusif, dan menolak upaya moderasi karena khawatir PKS kehilangan jati dirinya dan menjadi sekuler atau liberal. Perbedaan inilah yang pada akhirnya memicu friksi internal yang tajam (Silsiliyani, R., 2024).

Dengan menerapkan teori perpecahan partai, perpecahan yang terjadi dalam PKS dapat dipahami sebagai akibat dari ketidakmampuan partai untuk menampung friksi

ideologis yang telah menjadi tidak sesuai dengan struktur formal partai. Dalam sistem multipartai yang longgar seperti Indonesia, munculnya partai baru seperti Partai Gelora menjadi alternatif rasional bagi elite politik yang berkeinginan untuk menciptakan ruang baru bagi ekspresi politik mereka. Konflik ini juga merupakan contoh nyata dari factionalism yang berbahaya, di mana perselisihan internal tidak hanya sekadar perbedaan ide, tetapi telah berkembang menjadi disfungsi struktural yang dapat mengancam keberlangsungan partai secara keseluruhan (Boucek, 2009). Karena kurangnya mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, kelompok yang tidak puas tidak memiliki opsi lain kecuali membentuk wadah politik baru yang lebih sejalan dengan visi mereka.

Pemicu Utama dari Konflik Internal PKS

Pemicu utama dari konflik internal yang mengguncang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga melahirkan Partai Gelora dapat dilihat sebagai akumulasi dari tiga lapis dinamika, yaitu persoalan distribusi kekuasaan, perbedaan ideologis, serta kegagalan dalam struktur organisasi partai. PKS dikenal sebagai partai yang berideologi Islam Konservatif, namun dalam perjalanan memunculkan faksi-faksi yang berbeda dalam pandangan, konflik ini bukan hanya memunculkan ideologi yang berbeda saja, tetapi juga berimplikasi pada strategi politik dan kebijakan partai (Harefa, N. R. T. *et al.*, 2019).

Ali Rif'an menyoroti masalah pelembagaan dalam tubuh PKS. Meskipun secara struktural PKS dianggap sebagai partai yang cukup terlembaga dan tidak bergantung pada figur tertentu, namun dalam praktiknya keputusan-keputusan penting partai masih didominasi oleh segelintir elit, khususnya Dewan Syuro. Ketua partai bahkan dipilih oleh Dewan Syuro, bukan melalui mekanisme demokratis seperti kongres atau musyawarah nasional. Hal ini menandakan masih kurangnya demokratisasi di level internal meskipun dari luar tampak modern. Konflik ideologi dan kepemimpinan ini kemudian melahirkan perpecahan yang nyata, ditandai dengan kemunculan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) yang dipimpin oleh tokoh-tokoh muda eks PKS seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah. Dalam pandangan Ali, munculnya Gelora dapat dibaca dari dua sisi. Di satu sisi, ini mencerminkan ruang demokratisasi di mana kader yang tidak sekuat bisa menyalurkan aspirasi mereka melalui wadah baru. Namun di sisi lain, ini juga menjadi bukti kegagalan PKS dalam merangkul kader terbaiknya, yang pada akhirnya berdampak pada stagnasi pertumbuhan suara PKS di pemilu.

Adapun pemicu muncul dari perbedaan visi dan orientasi ideologis persoalan kekuasaan. Konflik juga dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai arah politik partai. PKS yang selama ini dikenal sebagai partai Islam konservatif mulai mengalami gejolak internal ketika sebagian elite muda mendorong reorientasi ke arah politik Islam yang lebih nasionalis dan moderat. Perbedaan ini menciptakan konflik yang tidak hanya soal jabatan, tetapi menyangkut dasar nilai dan arah gerakan partai. Konflik seperti ini sebagai bentuk konflik sosial yang muncul ketika organisasi tidak mampu mengakomodasi diversitas nilai di antara anggotanya, yang pada akhirnya memicu perpecahan internal (Alamsyah & Wibisono, 2023).

Awal Mula Konflik Golongan Muda dan Tua

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan sebuah organisasi politik di Indonesia yang berakar dari aktivisme di lingkungan universitas dan memiliki ikatan ideologis yang kuat dengan Islam politik. Seiring waktu, PKS telah menghadapi berbagai tantangan dalam, salah satunya adalah pertikaian yang mencolok antara anggota yang lebih tua dan yang lebih muda, yang merupakan elemen penting dalam dinamika politik internal partai. Ketegangan ini bukan sekadar perselisihan personal di antara individu-individu; ini mencerminkan adanya pergeseran ide, pandangan ideologis yang bertentangan, serta pendekatan politik yang berbeda antara kedua generasi tersebut.

Awal mula terjadinya konflik ini terjadi saat PKS mulai bertransformasi dari partai berbasis kader menjadi partai yang melayani massa setelah peristiwa reformasi. Generasi yang lebih tua—sering kali mencakup pendiri dan anggota yang telah lama bergabung selalu berusaha untuk mempertahankan struktur partai yang lebih eksklusif, yang ditopang oleh pelatihan ideologis yang ketat serta dedikasi yang tinggi terhadap prinsip-prinsip advokasi. Di sisi lain, generasi muda dalam partai muncul dengan pendekatan yang pragmatis dan lebih adaptif terhadap situasi politik di tingkat nasional. Mereka mendorong partai untuk mengadopsi nilai-nilai keterbukaan, fleksibilitas dalam menjalin koalisi, dan strategi pemilihan yang lebih agresif guna memperluas basis dukungan dari masyarakat.

Berjalan sejak perselisihan pada tahun 2016, pada Maret 2018 muncul sebuah dokumen yang berjudul waspada terhadap upaya penggulingan PKS tanpa diketahui siapa yang menyusunnya. Dalam tulisan itu, terdapat istilah osan dan osin. Osan adalah singkatan dari orang sana yang berkaitan dengan kelompok sejahtera, sedangkan osin merujuk pada orang sini yang berhubungan dengan kelompok keadilan (Harefa et al., 2021).

Konflik yang terjadi mulai nampak jelas dalam pemilihan internal serta penetapan calon legislatif dan calon kepala daerah, di mana para kader muda sering kali merasa dipinggirkan oleh pengaruh dari tokoh senior yang lebih tradisional. Kesenjangan ini semakin terlihat ketika menyikapi isu-isu nasional, seperti pandangan partai terhadap pemerintah, hubungan dengan kelompok Islam lainnya, serta strategi untuk menghadapi pemilu. Kelompok muda mengharapkan pendekatan yang lebih terbuka dan peka terhadap masalah-masalah modern seperti isu lingkungan, demokrasi digital, dan hak-hak sipil, sementara kelompok tua lebih mengutamakan isu-isu terkait moralitas dan konservatisme sosial.

Selain adanya konflik tersebut, PKS juga mengalami faksionalisasi. Dimana Faksionalisasi atau pembentukan kelompok-kelompok di dalam PKS terdiri dari dua, yaitu faksi keadilan dan faksi sejahtera. Masing-masing faksi ini memiliki tujuan dan landasan politik yang berbeda walaupun tetap dalam konteks partai yang berideologi Islam. Faksi keadilan di PKS terdiri dari individu-individu yang masih berpegang pada pemikiran lama dan tradisional (Fadli, 2023).

Secara keseluruhan awal mula terjadinya konflik antara generasi muda dan generasi tua ini dapat dipahami melalui sudut pandang konflik antar generasi serta teori organisasi politik, di mana perselisihan antara kelompok usia yang lebih tua dan yang lebih muda

dalam sebuah partai sering muncul ketika terdapat ketidaksesuaian dalam nilai, pendekatan, dan alokasi kekuasaan. Jika tidak ditangani dengan baik, jenis konflik ini berpotensi menimbulkan perpecahan dan disintegrasi struktural, seperti yang terlihat pada kasus PKS. Banyaknya perbedaan pendapat yang membuat partai PKS mengalami perbedaan pendapat yang pada akhirnya memicu konflik yang menimbulkan perpecahan.

Embarkasi Pada Perbedaan Ideologi Pragmatisme dan Idealisme

Salah satu faktor utama yang menyebabkan perpecahan dan pergeseran di dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang kemudian menghasilkan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), adalah perbedaan ideologis antara pragmatisme dan idealisme. Dalam situasi ini, idealisme berarti komitmen yang konsisten terhadap nilai-nilai ideologis tertentu, terutama yang berkaitan dengan politik identitas Islam. Kelompok senior PKS yang lebih tua cenderung mempertahankan idealisme yang kaku dan yang terkait dengan identitas partai Islam yang inklusif. Sebaliknya, faksi muda PKS mendorong idealisme yang lebih fleksibel dan inklusif (Supratomo., 2015).

Kelahiran Partai Gelora pada tahun 2019 dapat dianggap sebagai representasi praktis dari pergeseran ideologi ini. Gelora tidak lagi mengutamakan identitas keislaman secara eksklusif. Sebaliknya, mereka mengambil pendekatan politik yang lebih moderat dan mendukung visi "Indonesia lima besar dunia." Strategi ini sesuai dengan gaya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang sangat pragmatis. Seringkali, Jokowi dikritik karena mengutamakan kepentingan praktis, stabilitas politik, dan pembangunan sebagai fokus kebijakannya, bahkan jika itu berarti kompromi ideologis. Salah satu buktinya adalah terbentuknya koalisi politik yang signifikan yang melibatkan banyak partai politik, termasuk partai oposisi sebelumnya, dan memilih orang dari berbagai latar belakang ideologis untuk memimpin kabinetnya. Ini menunjukkan bahwa Jokowi lebih mempertimbangkan keberhasilan pemerintahan dari capaian program dan stabilitas kekuasaan daripada berpegang pada platform ideologis tertentu (Nugraha, T. A., & Mukti, H. G., 2023).

Penting bahwa praktik politik Indonesia saat ini semakin pragmatis. Ini tidak hanya terjadi di tingkat eksekutif, tetapi juga menyebar ke bagian ideologis partai politik. Oleh karena itu, Gelora muncul bukan hanya karena pertengkaran pribadi, tetapi juga karena perbedaan pendapat tentang bagaimana politik seharusnya dijalankan di bawah pemerintahan Jokowi. Pragmatisme politik yang ditunjukkan oleh Jokowi telah mendorong kelompok reformis dalam PKS untuk mengambil pendekatan yang sama, mengutamakan rasionalitas elektoral, keterbukaan terhadap berbagai identitas, dan penekanan pada masalah kebangsaan. Perbedaan ideologis ini mengganggu kesatuan partai. Mereka juga menunjukkan bahwa paradigma politik nasional Indonesia sedang berubah, dengan semakin sedikit orang yang melihat idealisme sebagai satu-satunya referensi.

Ali menutup pandangannya dengan menyebut bahwa "fenomena seperti ini sebenarnya tidak asing dalam politik Indonesia. Partai besar seperti Golkar pun mengalami perpecahan yang melahirkan partai-partai baru seperti Hanura, Nasdem, dan Gerindra. Namun demikian, PKS memiliki keunggulan tersendiri sebagai partai kader yang relatif

tidak bergantung pada figur, sehingga mampu menjaga stabilitas meski ketua umum berganti.”

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perpecahan internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan lahirnya Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) merupakan sebuah proses transformasi penting yang terjadi akibat perbedaan visi, kepentingan, dan pendekatan kepemimpinan di internal partai. Di satu sisi, kelompok senior PKS masih mempertahankan pendekatan ideologis dan pola kepartaian yang lebih eksklusif, sedangkan kelompok reformis dan kalangan muda menginginkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih terbuka, pragmatis, dan moderat demi mencapai visi Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di kancah internasional. Hal ini tercermin dari lahirnya Partai Gelora pada tahun 2019, yang kemudian menjadi ruang ekspresi dan kendaraan politik kelompok yang tidak terakomodasi visi dan kepentingannya di PKS.

Selain aspek perbedaan visi, perpecahan tersebut juga dipengaruhi oleh masalah distribusi kekuasaan, rigiditas kelembagaan, dan kurangnya mekanisme dialog dan akomodasi perbedaan. Hal ini kemudian menjadi masalah struktural yang tidak dapat diselesaikan secara internal, sehingga terjadi perpecahan dan faksionalisasi yang pada gilirannya melahirkan partai politik baru. Langkah kelompok reformis PKS untuk mendirikan Partai Gelora juga dapat dilihat sebagai upaya menemukan ruang dan identitas politik yang lebih sesuai, demi mewakili kepentingan dan visi yang tengah bergeser, yaitu dari pendekatan ideologis yang kaku menuju pendekatan yang lebih luas, pragmatis, dan terbuka.

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa terjadinya perpecahan internal di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebabkan oleh perbedaan visi, kepentingan, dan pendekatan kepemimpinan di antara para elite dan kader partai. Hal ini terlihat dari ketidakpuasan kelompok reformis serta kalangan muda terhadap kepemimpinan PKS yang dinilai masih bersifat elitis, konservatif, dan kurang terbuka terhadap perbedaan. Ketidakmampuan PKS dalam menyediakan ruang dialog dan akomodasi bagi kepentingan kelompok tersebut pada akhirnya menjadi akar masalah yang mendorong lahirnya Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) pada tahun 2019 yang muncul sebagai sebuah entitas politik yang lebih terbuka, moderat, dan pragmatis, untuk mewakili kepentingan serta visi kelompok yang terpinggirkan.

Dari proses perpecahan ini, terdapat pelajaran penting yang dapat diambil, yaitu perlunya sebuah partai untuk mengoptimalkan mekanisme dialog internal, menjaga transparansi, dan terbuka terhadap perbedaan demi terciptanya kepemimpinan yang matang dan demokratis. Dengan belajar dari perpecahan PKS, diharapkan partai politik di Indonesia dapat menjadi lebih matang, adaptif, dan mampu menjaga kesatuan, sambil memberikan ruang yang cukup bagi visi dan kepentingan yang berkembang di kalangan anggota serta masyarakat luas.

Referensi

- Akmar, Z. (2019). KONFLIK INTERNAL PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) TAHUN 2016: STUDI KASUS KONFLIK FAHRI HAMZAH DENGAN PIMPINAN DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) PKS. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), 1-27. <https://doi.org/10.14710/politika.10.1.2019.1-27>
- Alamsyah, M. S., & Wibisono, T. A. (2023). Komunikasi organisasi dalam menangani konflik hubungan pekerjaan di PT. Elephant Agung Perkasa. *Harmoni Widyakarya: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 45-58. <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v2i1.2486>
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317.
- Boucek, F. (2009). Rethinking factionalism: Typologies, intra-party dynamics and three faces of factionalism. *Party Politics*, 15(4), 455–485. <https://doi.org/10.1177/1354068809334553>
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Fadli, B. (2023). *Disintegrasi partai politik era reformasi: Studi kasus konflik internal PKS* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. http://digilib.uinsa.ac.id/64515/2/Bahrudin%20Fadli_I71219040.pdf
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research (6th ed.)*. SAGE Publications
- Harefa, T., Rinda, N., Bandiyah, B., & Azhar, M. A. (2019). Faksi dalam Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera di Provinsi Bali (Doctoral dissertation, Udayana University). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/54044>
- Hasbi, U. M. (2022) *Perbandingan Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dengan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Depok* (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). [Skripsi]
- Kodiman, A., & Fatimah, S. (2023). Urgensi dan Peran Partai Politik dalam Pembangunan Masyarakat Madani di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 84-91.
- Marx, K. dalam Ritzer, G. (2011). *Sociological Theory* (8th ed). New York: McGraw-Hill.
- Muhammad Sidiq, Robi Cahyadi Kurniawan, Arizka Warganegara, & Barokah, F. (2023). KEHADIRAN PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA SEBAGAI MANAJEMEN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 271–288. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.2822>

- Nugraha, T. A., & Mukti, H. G. (2023). Strategi Partai Baru: Partai Gelombang Rakyat Indonesia Menuju Elektoral 2024. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 99-115. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.19135>
- RIA, S. (2024). STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PASCA KONFLIK INTERNAL MENUJU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi pada Dewan Perwakilan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung). [skripsi]
- Robi Panggarra, Konflik kebudayaan menurut Teori Lewis Alfred Coser dan Relevansinya dalam upacara Pemakaman (Rambu solo') Di Tana Toraja. *JURNAL JAFFRAY*, Vol. 12, No. 2, Oktober 2014, hlm. 293. Lihat juga; Lewis A. Coser, *The Function of Social Conflict* (New York: The Free Press, 1968), hlm. 77-80.
- Sari, H. A. (2017). Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah: Studi Tentang Seleksi Kandidat di Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilukada Kota Tasikmalaya Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Politik*, 15-35. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2819687&val=25217&title=Rekrutmen+Politik+Calon+Kepala+Daerah+Studi+Tentang+Seleksi+Kandidat+di+Partai+Keadilan+Sejahtera+Dalam+Pemilukada+Kota+Tasikmalaya+Tahun+2017>
- Sartori, G. (1976). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sartori, G. (2005). Parties and party systems: A framework for analysis. https://psv4.userapi.com/s/v1/d/zxqKO9stHQoFHE0gm0E59pFLQE7kk3Asrjp7y_oNcS07JGRrHEfxArW0lyitEP8wW-40NnC6JCgin6Rvad3jZZL48kkcqxCsJdKj-NivRbJ12sPj/Giovanni_Sartori-Parties_and_Party_Systems_A_Framework_for_Analysis_2005.pdf
- Satria, F. (2022). *Partai politik dan dinamika internal: Studi atas penurunan perolehan kursi dan konflik internal partai politik di Indonesia* (Skripsi). Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/45662/5/SKRIPSI%20FULL%20TEXT%20ARRI.pdf>
- Scott, W. R. (2003). *Organizations: Rational, Natural, and Open Systems* (5th ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Sidiq, M., Kurniawan, R. C., Warganegara, A., & Barokah, F. (2023). Kehadiran Partai Gelombang Rakyat Indonesia Sebagai Manajemen Konflik Internal Partai Politik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 271-288.
- Supratmono, S (2017) *IDEALISME DAN PRAGMATISME PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) IMPLEMENTASI REKRUTMEN TERHADAP CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015*. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/777>

Syaputra, F. A., Alfia, B., & Azwar, A. (2022). SISTEM KEPARTAIAN GIOVANNI SARTORI. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(2), 433-436.

Wodak, R. (2020). *The politics of fear: The shameless normalization of far-right discourse*. SAGE Publications.

Yusuf, H. (2020). *Fragmentasi Partai Politik di Era Reformasi: Studi Perbandingan PKS, PAN, dan Demokrat*. Jurnal Transformasi Politik, 7(3), 120–138.